



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHMUD HD.
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 19622

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.934.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 691 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.934.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 197.700.000**

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 89.400.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 271.091.157****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	2.492.191.157
III. HUTANG	Rp.	1.850.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.490.341.157

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.